



OVERVIEW PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN HUKUM



Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

JUNI
2025

Penanggung Jawab

Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA., QHIA., QIA.

Penulis

Kiki Zakiah, S.E., M.AP, CRP

Slamet Dhul Fadli, S.E

Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L



Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

3,929.90

APBN 2025 (miliar Rp)

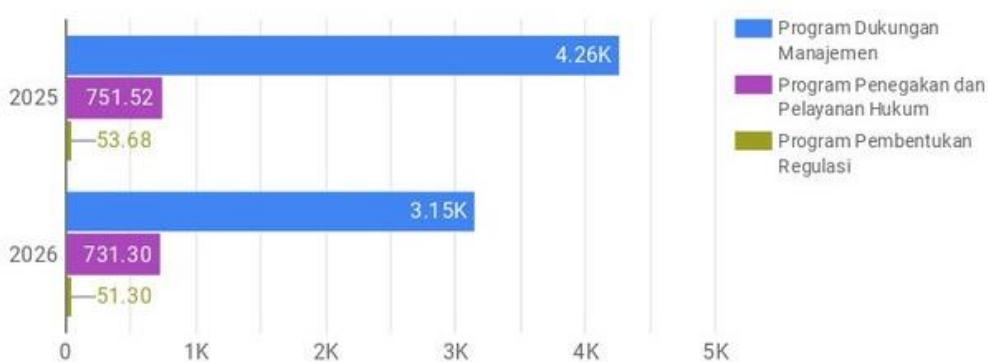
5,066.60

Efisiensi 2025 (miliar Rp)***

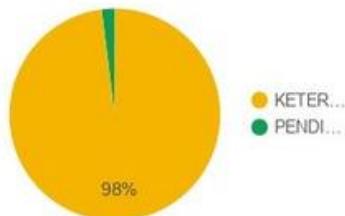
1,678.29

33.1%

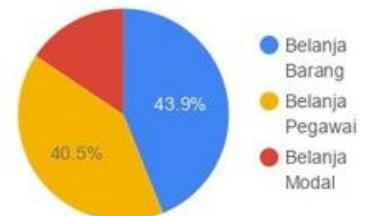
Perkembangan Pagu Belanja K/L Berdasarkan Program



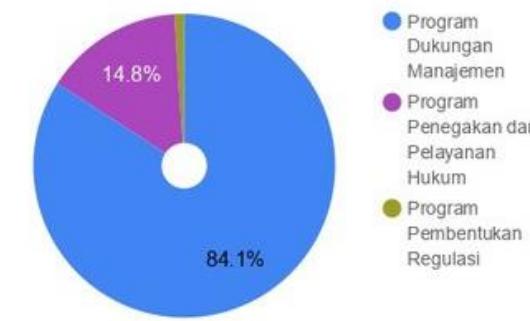
Belanja K/L Berdasarkan Fungsi TA Berjalan



Belanja K/L Berdasarkan Jenis Belanja TA Berjalan



Belanja K/L Berdasarkan Program TA Berjalan



*) Angka LKPP TA 2024 merupakan angka outlook APBN tahun 2024.

**) Angka 2025 merupakan angka APBN Belanja K/L TA 2025 bersumber dari Perpres 201/2024 Tentang Rincian APBN 2025.

***) Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR atas tindak lanjut Inpres 1/2025. Bagi K/L yang tidak memiliki angka efisiensi, dikarenakan pembahasan di DPR merupakan rapat tertutup.

*) Angka LKPP TA 2024 merupakan angka outlook APBN tahun 2024. **) Angka 2025 merupakan angka rancangan Belanja K/L TA 2025 bersumber dari NK RAPBN Tahun 2025.

Highlights Overview Pagu Indikatif Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2026

- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 sebanyak 48 Kementerian. Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu instansi yang mengalami transformasi menjadi 4 Kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.
- Pada tahun 2024, Kemenkumham memiliki 2 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Kinerja. Dari kedua Indikator Kinerja Utama Menteri Hukum dan HAM Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa Indikator 1 “Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat” tercapai 117,09% dan Indikator 2 “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” belum dapat dilakukan perhitungan capaian karena Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2024 masih dalam penilaian Kementerian PAN-RB.

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis dan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat	Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat	“3,1 Indeks”	“3,63 Indeks”	“117,09 %”
2.	“Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi Yang Berintegritas, Efektif dan Efisien”	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	“85 Indeks”	“90,38 Indeks”	Hasil Evaluasi Sementara Reformasi Birokrasi Tahun 2024 pada Portal RB

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Ham, 2024

- Pada Kementerian Hukum, pagu anggaran tahun 2025 mencapai Rp 5.06 triliun, dengan nilai efisiensi sebesar Rp1.68 triliun, yang mencerminkan penerapan kebijakan efisiensi anggaran sebesar 33,1% sebagai hasil pembahasan dengan DPR dan tindak lanjut Inpres 1/2025. Sementara itu, untuk tahun 2026, pagu mengalami penurunan menjadi Rp3.93 triliun. Penurunan ini sejalan dengan kebijakan penghematan dan penyesuaian struktur kelembagaan yang baru terbentuk.
- Perkembangan pagu belanja berdasarkan program pada Kementerian Hukum tahun 2025, alokasi terbesar diberikan kepada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp4.26 triliun, diikuti oleh Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp751,52 miliar, dan Program Pembentukan Regulasi sebesar Rp53,68 miliar. Tahun 2026 menunjukkan pola yang hampir sama, namun dengan nilai yang sedikit menurun akibat pagu total yang berkurang.
- Komposisi anggaran Kementerian Hukum tahun 2025 memperlihatkan bahwa 84,1% dari total anggaran dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen. Ini mencerminkan fokus utama lembaga pada penguatan manajemen internal dan dukungan administratif, ditujukan sebagai fondasi awal karena lembaga ini merupakan hasil pemisahan dan reorganisasi struktural.